Katalog : 4102004.7407

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN WAKATOBI
2020

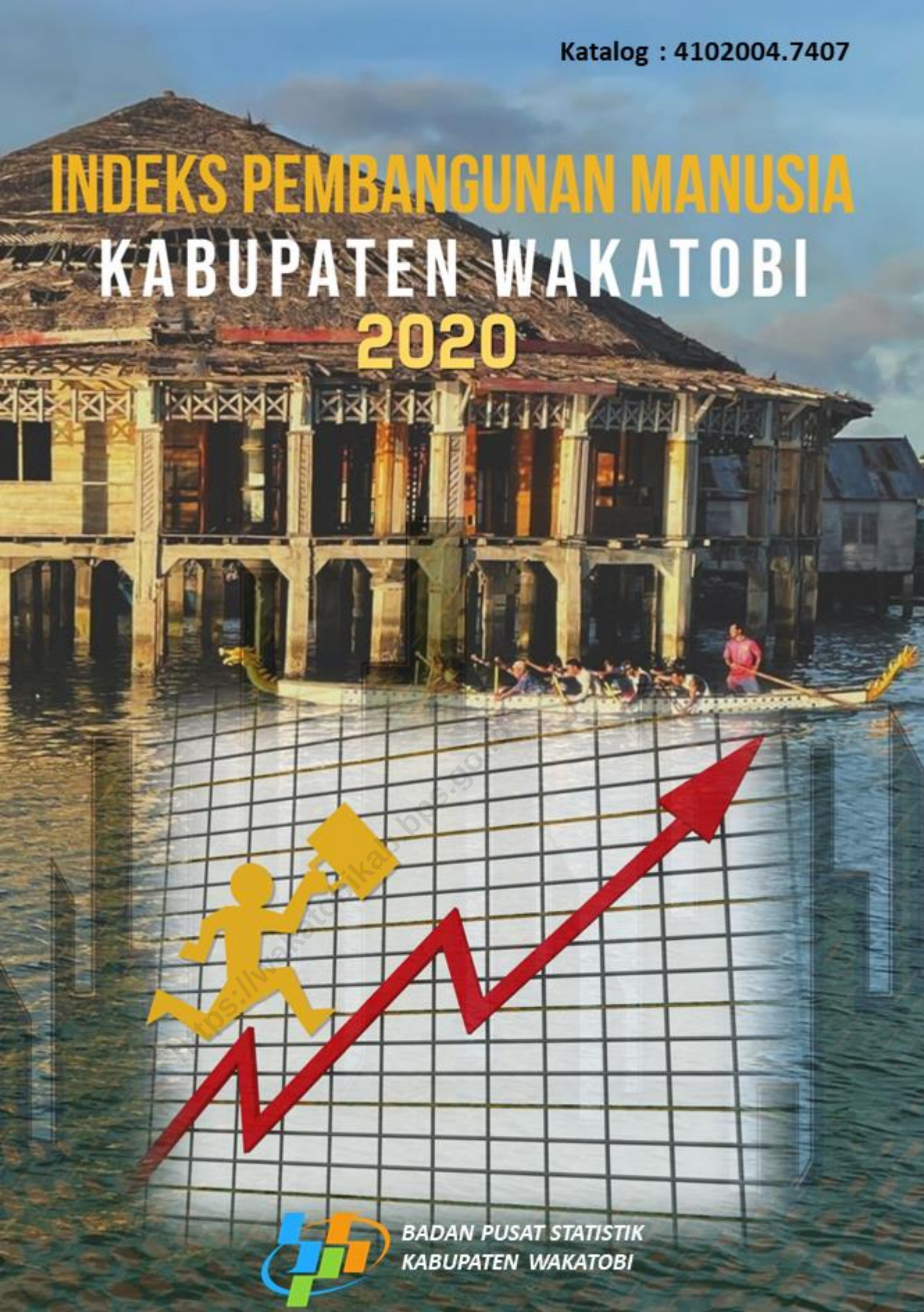

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI

Katalog : 4102004.7407

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN WAKATOBI
2020

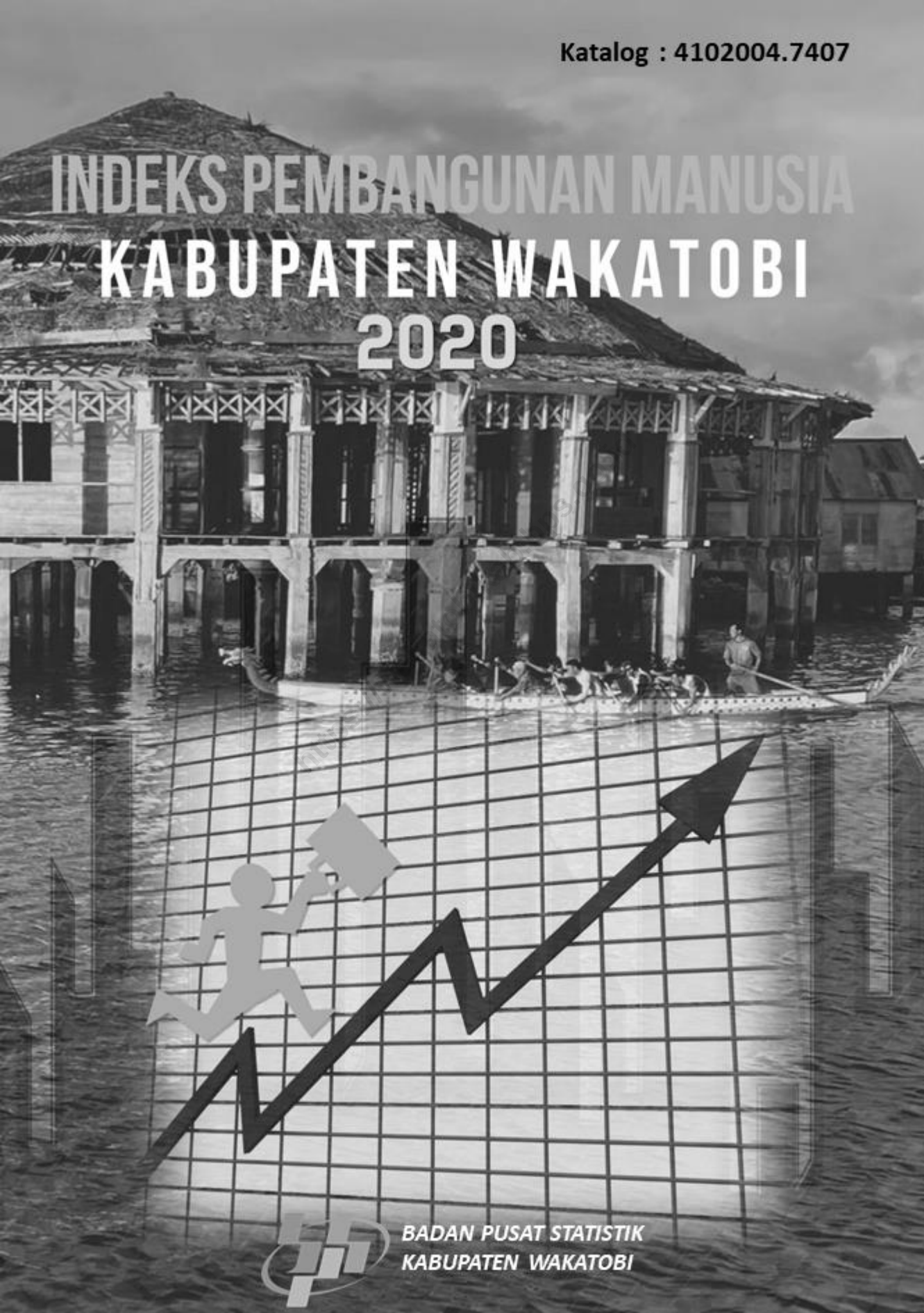

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

Nomor ISSN : -

Nomor Publikasi : 7407.2218

Katalog : 4102004.7407

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 44 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Sumber Ilustrasi :
freepik.com
postermywall.com

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

https://wakatobikab.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum
Towedy Marthinus Layico, S.Si.

Penyunting
Muhammad Nur Kamal, SST

Penulis
La Ode Misran, S.Tr.Stat.

Penyajian Data
La Ode Misran, S.Tr.Stat.

Perwajahan Isi dan Gambar Kulit
La Ode Misran, S.Tr.Stat.

https://wakabaukab.bps.go.id

"… Halaman Sengaja Dikosongkan…"

https://wakatobikab.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi yang diterbitkan di tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu data strategis yang dihasilkan oleh BPS. Sebagai indeks komposit, Indeks Pembangunan Manusia mampu mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi penting yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi tahun 2020, hasil penghitungan besaran IPM beserta indeks komponen-komponen penyusunnya serta perkembangannya, disparitas IPM antarwilayah, dan posisi absolut antarwilayah dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara simultan. Data yang digunakan dalam penghitungan IPM ini bersumber dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Berita Resmi Statistik dan data dari dinas-dinas/instansi terkait.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan pada masa mendatang.

Wangi-Wangi, Desember 2021
Kepala BPS Kabupaten Wakatobi

Towedy Marthinus Layico, S.Si

https://wakabupkab.bps.go.id

"… Halaman Sengaja Dikosongkan…"

https://watatobikab.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		**v**
Daftar Isi		**vii**
Daftar Tabel		**ix**
Daftar Gambar		**xi**
Daftar Lampiran		**xiii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tujuan Penulisan	6
1.3	Manfaat Penulisan	7
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB 2	**METODOLOGI**	**9**
2.1	Pengertian Indeks Pembangunan Manusia	11
2.2	Sejarah Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia	12
2.3	Sumber Data	13
2.4	Metode Penyusunan Indeks	13
2.5	Manfaat dan Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia	17
2.6	Mengukur Kecepatan Perkembangan IPM	18
BAB 3	**PEMBAHASAN**	**21**
3.1	Menuju Masyarakat Kabupaten Wakatobi yang Sehat: Tinjauan Angka Harapan Hidup (AHH)	25
3.2	Menuju Masyarakat Kabupaten Wakatobi yang Madani dan Berwawasan Luas: Tinjauan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	26
3.3	Menuju Masyarakat Kabupaten Wakatobi yang Mandiri dan Kuat Secara Ekonomi: Tinjauan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	
3.4	Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020	30
BAB 4	**PENUTUP**	**33**
LAMPIRAN		**37**

https://wakatobikab.bps.go.id

"… Halaman Sengaja Dikosongkan…"

https://lwakatobikab.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Nilai Minimum dan Maksimum Indikator Komponen IPM..... 17

https://wakatobikab.bps.go.id

"… Halaman Sengaja Dikosongkan…"

https://watatobikab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Sejarah Penghitungan IPM..... 12
3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wakatobi, 2016-2020..... 23
3.2 Pertumbuhan IPM Kabupaten Wakatobi, 2016-2020..... 24
3.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Wakatobi, 2016-2020..... 25
3.4 RLS dan HLS Kabupaten Wakatobi 2016-2020..... 27
3.5 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Wakatobi 2016-2020..... 29
3.6 IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2020..... 30
3.7 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2020..... 31

https://wakatobikab.bps.go.id

"… Halaman Sengaja Dikosongkan…"

https://lwakatobikab.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020..... 39
Lampiran 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020 40
Lampiran 3. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020..... 41
Lampiran 4. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020..... 42
Lampiran 5. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020..... 43
Lampiran 6. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020..... 44

https://wakatobikab.bps.go.id

"… Halaman Sengaja Dikosongkan…"

https://lwakatobikab.bps.go.id

BAB 1
PENDAHULUAN

https://lwakatobikab.bps.go.id

"... Halaman Sengaja Dikosongkan ..."

https://wakatobikab.bps.go.id

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan manusia secara umum memiliki makna yang sangat luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri berputar pada pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Adapun fokus utama dari ide dasar tersebut terletak pada poin manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan hakiki bagi sebuah bangsa. Oleh karenanya, tujuan utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang mampu memberikan masyarakat kesehatan, umur yang panjang, dan kehidupan yang produktif. Hal ini tampak sangat sederhana namun nyatanya sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek manusia, contohnya mengumpulkan harta dan uang.

Selama ini, seringkali yang menjadi tujuan utama bagi sebuah negara hanyalah mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Suatu negara akan dilabeli sebagai negara yang maju atau makmur apabila memiliki parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan demi mencapai tujuan itu seringkali aspek kehidupan lainnya seperti kesehatan atau pendidikan, menjadi terabaikan. Hal ini tidaklah mengherankan karena jauh sebelum konsep pembangunan manusia berkembang, konsep klasik pembangunan hanyalah berputar pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Konferensi Internasional bertema *Asia 2015* di London pada 6 - 7 Maret 2006, paradigma pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selamanya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncul sebuah paradigma baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan *pembangunan manusia*.

Mengapa pembangunan manusia? Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah dunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya

https://wakatobikab.bps.go.id

alam yang dimilikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Di samping itu, pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menghambat potensi-potensi pertumbuhan ekonomi.

Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah tangga miskin. Akibatnya, saat kesempatan ekonomi meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masalah sosial.

Perbaikan kesenjangan hanya bisa dicapai dengan melakukan investasi pada pembangunan manusia, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses, kualitas, dan layanan di bidang kesehatan. Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu

1. **Produktivitas**: Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia;
2. **Ekuitas**: Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini;
3. **Kesinambungan**: Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang

akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi;

4. **Pemberdayaan**: Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pembangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan pengukuran pembangunan manusia akan menjadi sulit untuk dianalisis. Sehingga, diperlukan pemilihan faktor-faktor yang paling utama yang mampu menggambarkan dengan baik nilai pembangunan manusia yang telah dicapai. Adapun dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index* (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan untuk menjelaskan dimensi ekonomi dan hidup layak.

Untuk memperoleh indeks pembangunan manusia yang tinggi diperlukan adanya fasilitas pendukung guna mengoptimalkan ketiga dimensi tersebut bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai

untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Saat ini isu perkembangan pembangunan manusia telah ditanggapi serius oleh pemerintah Indonesia dan perkembangannya pun kini semakin positif. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Publikasi "**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wakatobi Tahun 2020**" ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan-pembangunan manusia serta komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi tahun 2020. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar waktu serta wilayah, umumnya data disajikan dari tahun 2016- 2020 untuk membandingkan dengan kondisi sebelumnya serta disajikan menurut kabupaten/kota. Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi umum pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi dari tahun ke tahun;

2. Menyajikan analisis indeks pembangunan manusia dan perkembangannya serta komponen-komponen indeks pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi dari tahun ke tahun.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

1. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi secara berkesinambungan;
2. Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya;
3. Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 disusun menjadi beberapa bab dan diorganisasikan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan;
- Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghitungan IPM;
- Bab III Pembangunan Manusia di Kabupaten Wakatobi memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Pembahasan diperluas dengan melakukan komparasi

https://wakatobikab.bps.go.id

pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara;

- Bab IV Penutup ini berisi kesimpulan dari paparan pada Bab III sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.

https://wakatobikab.bps.go.id

BAB 2

METODOLOGI

https://wakatobikab.bps.go.id

"... Halaman Sengaja Dikosongkan ..."

https://wakatobikab.bps.go.id

2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report*,1995:103), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;
c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas manusia), tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal;
d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Atau secara khusus, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu

https://wakatobikab.bps.go.id

umur harapan hidup saat lahir yang mewakili bidang kesehatan, angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai ukuran kualitas hidup.

2.2 Sejarah Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pembangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan 1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

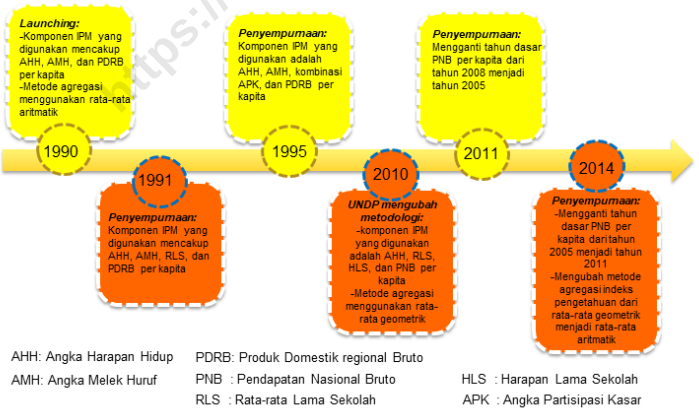

Gambar 2.1 Sejarah Penghitungan IPM
Sumber: Badan Pusat Statistik

Penghitungan IPM di seluruh Indonesia pada tahun 2014 menggunakan metode baru. Alasan pertama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah ada beberapa indikator sudah tidak tepat untuk

digunakan dalam penghitungan IPM. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM metode lama dianggap sudah tidak sesuai. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik pada IPM metode lama tersebut mengakibatkan ada informasi yang tertutup dikarenakan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari berbagai survei yang dilakukan oleh BPS, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, data penduduk hasil perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Wakatobi dan beberapa data penunjang lain. Data SUSENAS KOR digunakan untuk menghitung Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sementara Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) dihitung menggunakan data SUSENAS yang dikoreksi dari data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) dan Proyeksi Penduduk. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan yang dihitung menggunakan data Susenas Modul Konsumsi, yang didasarkan pada 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

2.4 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak.

Dimensi Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) atau umur harapan hidup saat lahir dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. AHH dihitung dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) dan proyeksi penduduk untuk tahun berikutnya. Sementara

itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks (AHH_{maks}) adalah 85 tahun dan batas minimum (AHH_{min}) 20 tahun. Penghitungan AHH dilakukan secara tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan dua data dasar yakni rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live birth*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) untuk setiap wanita berusia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan AHH dilakukan dengan perangkat lunak *Micro Computer Program For Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack Life* dengan metode *Trussel* dan model *West*. Rumus Indeks Dimensi Kesehatan:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \quad (2.1)$$

https://wakatobikab.bps.go.id

Dimensi Pengetahuan

Untuk mengukur tingkat pengetahuan digunakan dua ukuran yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years Of Schooling* (MYS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected Years of Schooling* (EYS). Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar dimulai dari usia 7 tahun. Sumber data berasal dari data SUSENAS. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa bersekolah di pesantren, sumber data pesantren yaitu Direktorat Pendidikan Islam. HLS dapat digunakan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

- Rumus Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

$$RLS = \frac{1}{P_{25+}} \sum_{i=1}^{P_{25+}} s_i \qquad (2.2)$$

Dimana

P_{25+} : Jumlah penduduk usia 25 ke atas

s_i : Lama sekolah penduduk ke-*i* (1,2,...,P_{25+}) yang mana :

- Tidak pernah bersekolah = 0
- Masih sekolah jenjang SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
- Masih sekolah jenjang S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir + kelas terakhir - 1

Adapun Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan adalah:

SD	: 6 tahun	Akademi/Diploma III	: 15 tahun
SMP	: 9 tahun	Sarjana/Diploma IV	: 16 tahun
SMA	: 12 tahun	Pasca Sarjana	: 18 tahun
Diploma I	: 13 tahun	Doktor	: 21 tahun
Diploma II	: 14 tahun		

- Rumus Harapan Lama Sekolah (HLS)

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t} \qquad (2.3)$$

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK : Faktor koreksi pesantren

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia $(a,a+1,...,n)$

Sedangkan rumus untuk menghitung Indeks Dimensi Pengetahuan adalah:

https://wakatobikab.bps.go.id

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2} \quad (2.4)$$

dimana I_{RLS} (Indeks Rata-rata Lama Sekolah) dan I_{HLS} (Indeks Harapan Lama Sekolah) dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \quad (2.5)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS_a^t - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad (2.6)$$

Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pengeluaran perkapita disesuaikan diperoleh dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* - PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Modul SUSENAS, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan yang dalam penghitungannya menggunakan Metode Rao. Rumus penghitungan paritas daya beli:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{\frac{1}{m}} \quad (2.7)$$

Dimana PPP_j : paritas daya beli di wilayah *j*
p_{ij} : harga komoditas *i* di kabupaten/kota *j*
p_{ik} : harga komoditas *i* di Kota Jakarta Selatan
m : jumlah komoditas

Rumus Indeks Pengeluaran (I_{PPP}) adalah:

$$I_{PPP} = \frac{\ln(PPP_j) - \ln(PPP_{\min})}{\ln(PPP_{\text{maks}}) - \ln(PPP_{\min})} \quad (2.8)$$

Untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indeks dimensi yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Nilai Minimum dan Maksimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US$)	1.007.436 (Rp)*	107.721 (PPP US$)	26.572.352 (Rp)***

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan:
- Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.
* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara, Papua
** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Rumus Indeks Pembangunan Manusia adalah:

$$IPM = \sqrt[3]{(I_{Kesehatan} \times I_{Pengetahuan} \times I_{PPP})} \quad (2.9)$$

2.5 Manfaat dan Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mengungkapkan bahwa kenaikan pendapatan yang besar atau pertumbuhan yang tinggi bisa memiliki peran yang lebih kecil dalam kerangka pembangunan manusia (Todaro dan

https://wakatobikab.bps.go.id

Smith, 2006). Adapun manfaat dari perhitungaan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

a. Sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia;
b. IPM dijadikan salah satu indikator target pembangunan pemerintah;
c. IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Keterbatasan dari Indeks Pembangunan Manusia antara lain:

a. Indeks Pembangunan Manusia masih mempunyai kelemahan dari segi data dan inteprestasi. Kelemahan yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Artinya, IPM suatu negara, provinsi atau kabupaten/kota tidak bermakna tanpa dibandingkan dengan IPM negara, provinsi atau kabupaten/kota lainnya;
b. Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang memiliki dimensi begitu luas dengan sebuah indeks komposit adalah suatu yang mustahil. Artinya, masih banyak dimensi pembangunan manusia yang belum terangkum dan terukur oleh indeks tersebut;
c. IPM maupun indikator penyusunnya sebagai sebuah angka rata-rata, sehingga IPM belum mempertimbangkan unsur kesetaraan gender, perbedaan etnis maupun kawasan. Indeks ini hanya mampu mengidentifikasi apakah suatu wilayah telah melaksanakan proses pembangunan atau belum, tetapi tidak mampu menjelaskan kelompok mana saja atau bagian penduduk yang mana yang berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

2.6 Mengukur Kecepatan Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antar capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Rumus pertumbuhan IPM:

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100 - 100 \qquad (2.10)$$

Dimana

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun *t*

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun *t*-1

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu :

- Nilai IPM kurang dari 60 maka termasuk kategori rendah
- Nilai IPM antara 60 - 70 maka termasuk kategori sedang
- Nilai IPM antara 70 - 80 maka termasuk kategori tinggi
- Nilai IPM lebih dari 80 maka termasuk kategori sangat tinggi.

Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

https://wakatobikab.bps.go.id

https://wakatobikab.bps.go.id

BAB 3
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WAKATOBI

https://wakatobikab.bps.go.id

"... Halaman Sengaja Dikosongkan ..."

https://wakatobikab.bps.go.id

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Sejak IPM metode baru pertama kali pada tahun 2010, hingga tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melakukan penghitungan IPM level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahun, termasuk Kabupaten Wakatobi.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Wakatobi terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kabupaten Wakatobi meningkat dari 67,5 pada tahun 2016 menjadi 69,48 pada tahun 2020 (Lihat Gambar 3.1). Sementara jika dilihat dari peringkat se-Provinsi Sulawesi Tenggara, IPM Kabupaten Wakatobi menempati urutan keenam dari 17 kabupaten/kota. Dengan nilai IPM tersebut, Kabupaten Wakatobi termasuk dalam kategori wilayah IPM level sedang. Jika melihat tren perkembangannya dari tahun ke tahun yang terus meningkat, Kabupaten Wakatobi berpeluang besar untuk masuk ke dalam kategori wilayah dengan status pembangunan manusia yang tinggi dalam waktu dekat.

https://wakatobikab.bps.go.id

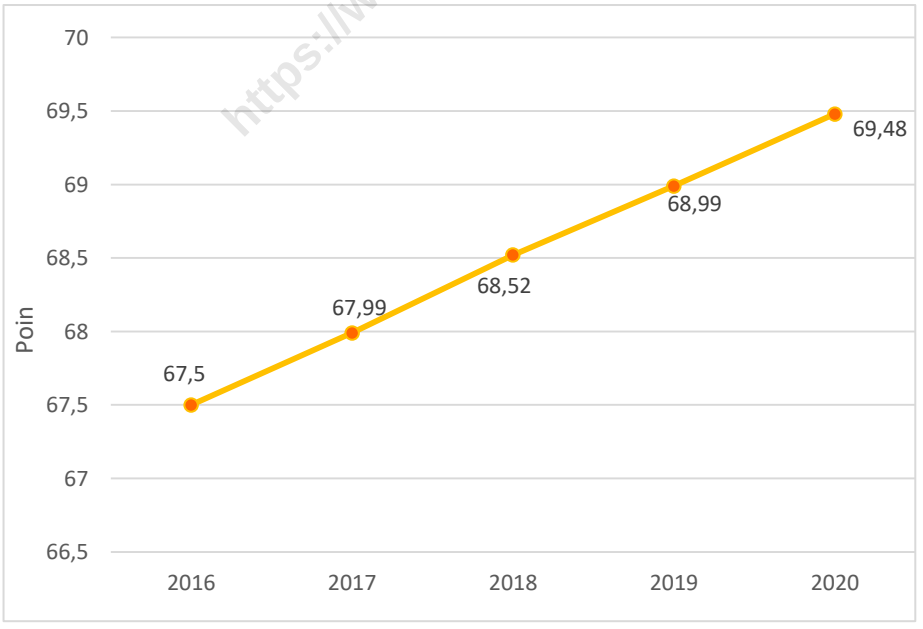

Gambar 3.1: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wakatobi, 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Level capaian IPM memang penting untuk melihat kemajuan pembangunan suatu wilayah. Namun, level saja tidak cukup untuk mencatat kemajuan pembangunan manusia. Kecepatan pembangunan manusia dapat melengkapi sudut pandang capaian pembangunan manusia. Kecepatan lebih menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai suatu level tertentu dalam pembangunan manusia.

Kecepatan pembangunan manusia diukur dengan pertumbuhan IPM. Selama rentang tahun 2016-2020, IPM Kabupaten Wakatobi rata-rata tumbuh sebesar 0,66 persen per tahun dimana tingkat pertumbuhannya cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Wakatobi tumbuh 0,71 persen atau meningkat 0,49 poin. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 0,78 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 0,42 persen.

https://wakatobikab.bps.go.id

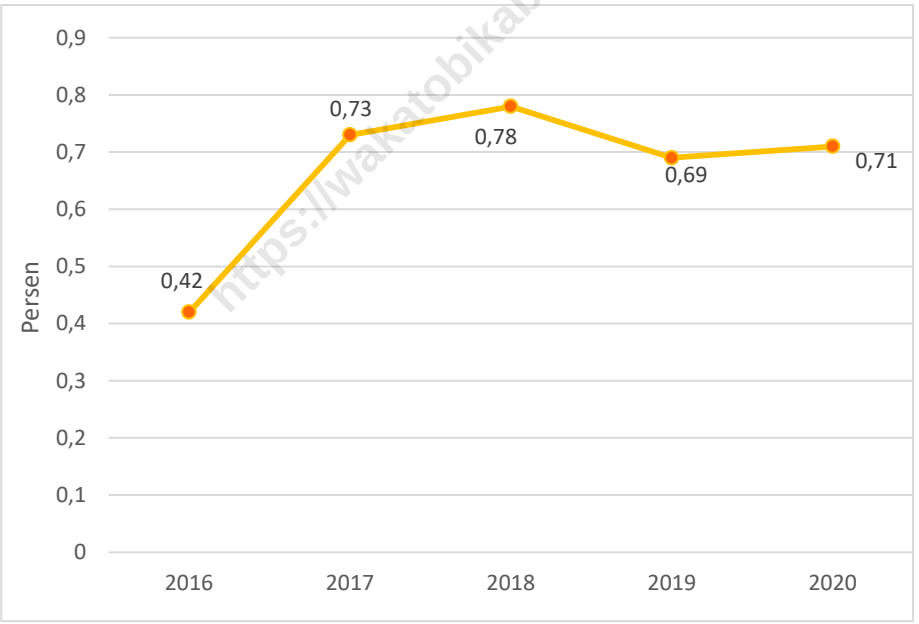

Gambar 3.2: Pertumbuhan IPM Kabupaten Wakatobi, 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (Data Diolah)

Capaian IPM kabupaten Wakatobi merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Lebih lanjut ketiga dimensi tersebut akan dijelaskan pada subbab dibawah ini.

3.1 Menuju Masyarakat Kabupaten Wakatobi yang Sehat: Tinjauan Angka Harapan Hidup (AHH)

Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Berbicara tentang kualitas kesehatan maka akan berbicara lebih banyak terkait akses, pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan ketersediaan sarana kesehatan. Kesehatan tidak hanya dapat dipandang sebagai gaya hidup pribadi saja, melainkan kesehatan yang akan dibahas adalah terkait peran serta pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kesehatan yang baik tentu akan mampu memperpanjang usia hidup seseorang.

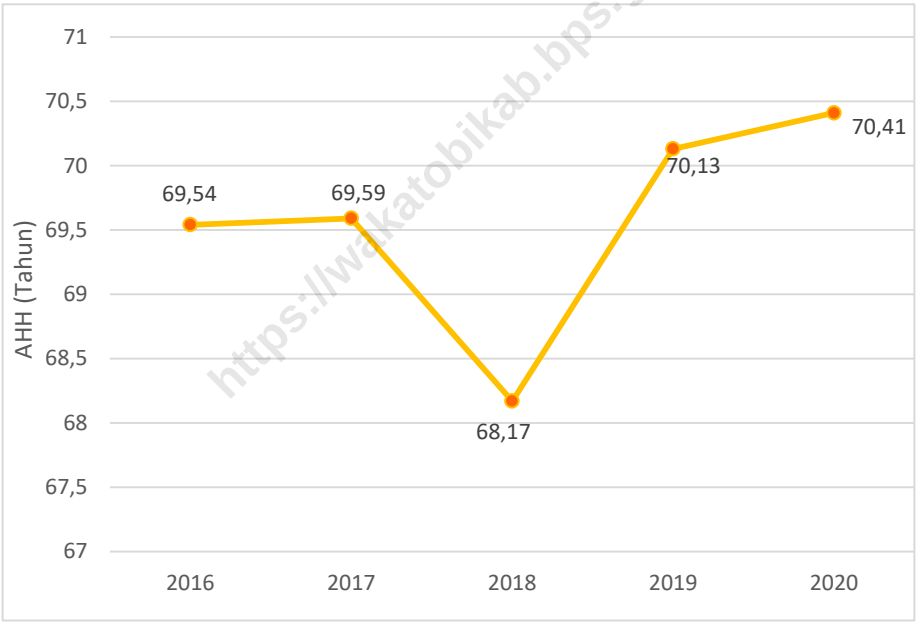

https://wakatobikab.bps.go.id

Gambar 3.3: Angka Harapan Hidup Kabupaten Wakatobi, 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Salah satu dimensi IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Angka atau umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.

Tren umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Wakatobi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat berfluktuasi (Lihat Gambar 3.3). Selama periode 2016-2020, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Wakatobi meningkat sebesar 0,87 persen, dimana pada tahun 2016 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Wakatobi sebesar 69,54 tahun, menjadi 70,41 tahun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan harapan hidup bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Indikatornya adalah adanya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

Peningkatan angka harapan hidup ini juga didukung oleh beberapa indikator yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Berdasarkan data SUSENAS Bulan Maret 2019-2020, persentase penduduk Kabupaten Wakatobi yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,48 persen atau lebih tinggi 0,31 persen dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, penduduk wanita yang berusia 60 ke atas pada tahun 2020 sebesar 12,27 persen atau 0,23 persen lebih tinggi daripada 2019. Angka kesakitan (persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan) pada tahun 2020 menurun 0,89 persen dari tahun 2019 menjadi yakni sebesar 9,39 persen. Sementara itu, penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2020 sebesar 79,8 persen atau meningkat sebesar 21,25 persen dari 2019.

https://wakatobikab.bps.go.id

3.2 Menuju Masyarakat Kabupaten Wakatobi yang Madani dan Berwawasan Luas: Tinjauan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pendidikan bukanlah hal baru dalam hal pengembangan modal manusia. Pendidikan memegang peran kunci untuk mencetak SDM yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat mengubah pola pikir masyarakat dari statis tradisional menjadi dinamis rasional. SDM yang berkualitas akan menjadi titik sentral pembangunan pada masa yang akan datang. Pendidikan dapat difungsikan sebagai motor penggerak terbentuknya masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang mampu memanfaatkan berbagai sumber daya, peluang, dan kecerdasannya untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan segala kreativitas yang dimiliki.

Dimensi pengetahuan atau pendidikan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung nilai harapan menyelesaikan pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung berapa lama masa sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah relatif sedikit lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

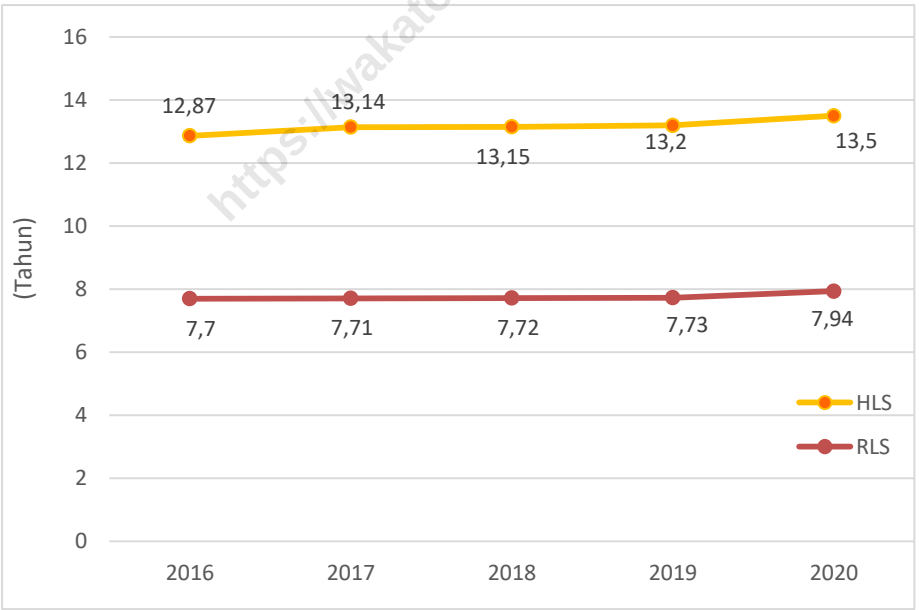

Gambar 3.4: RLS dan HLS Kabupaten Wakatobi 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wakatobi positif (secara umum meningkat) dari tahun 2016 hingga

tahun 2020 (Lihat Gambar 3.4). Secara rata-rata, angka harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,04 persen per tahun selama tahun 2016-2020. Sedangkan rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,65 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Tren peningkatan ini mengindikasikan semakin membaiknya kualitas dan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Wakatobi.

Peningkatan RLS dan HLS juga didukung oleh beberapa indikator yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).Berdasarkan data Susenas Bulan Maret 2019-2020, tingkat partisipasi penduduk usia 7-24 tahun yang bersekolah setingkat SMA ke atas pada tahun 2020 sebesar 19,64 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2,37 persen dari tahun 2019. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada tahun 2020 sebesar 81,31 persen atau 1,95 persen lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 79,36 persen.

https://wakatobikab.bps.go.id

3.3 Menuju Masyarakat Kabupaten Wakatobi yang Mandiri dan Kuat Secara Ekonomi: Tinjauan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Tujuan pembangunan modal manusia pada gilirannya untuk dapat memposisikan masyarakat Kabupaten Wakatobi menjadi masyarakat yang mandiri dan kuat secara ekonomi. Kemandirian dapat terbentuk dari perolehan pendapatan yang terus meningkat sehingga pemenuhan kebutuhan dasar semakin meningkat dan mengarah pada kebutuhan sekunder dan tersier. Indikator yang mewakili pemenuhan kebutuhan dasar tersebut adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Wakatobi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama periode 2016-2020, pengeluaran per kapita Kabupaten Wakatobi mengalami laju pertumbuhan rata-rata 1,66 persen per tahun (Lihat Gambar 3.5). Jika pada tahun 2016 pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Wakatobi hanya sebesar 8,65 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2020 telah mencapai 9,20 juta rupiah per tahun. Meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 1,96 persen dari tahun 2019. Perlu diketahui sebagai catatan bahwa pengeluaran per kapita di sini

adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang telah disesuaikan antar daerah (pengeluaran per kapita disesuaikan).

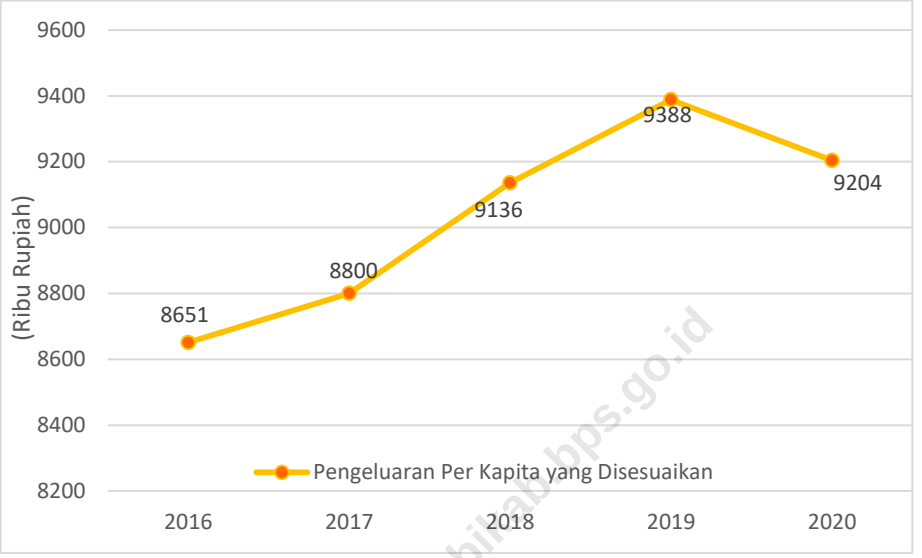

Gambar 3.5: Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Wakatobi 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Tren kenaikan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Wakatobi juga didukung oleh beberapa data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret 2019-2020. Dari data Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada setiap kelompok pengeluaran penduduk Wakatobi secara umum meningkat di tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan non makanan di tahun 2020 pada kelompok pengeluaran 40% terbawah sebesar Rp 428.455 (naik 27,9%), pada kelompok 40% tengah sebesar Rp 903.975 (naik 19,78%), dan pada kelompok 20% teratas sebesar Rp 1.816.866 (naik 3,28%). Lebih rinci, rata-rata pengeluaran untuk makanan di tahun 2020 pada kelompok pengeluaran 40% terbawah sekitar Rp 294.100 (naik 56,81%), pada kelompok pengeluaran 40% tengah sekitar Rp 509.876 (naik 24,37%), dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas sekitar Rp 776.052 (turun 9,25%). Kemudian, rata- rata pengeluaran untuk non makanan di tahun 2020 pada kelompok pengeluaran 40% terbawah sekitar Rp 134.355 (turun 8,82%),

https://wakatobikab.bps.go.id

pada kelompok pengeluaran 40% tengah sekitar Rp 394.099 (naik 14,32%), dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas sekitar Rp 1.040.814 (naik 15,15%). Selain itu, penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet 3 bulan terakhir meningkat dari 31,5 persen di 2019 menjadi 42,95 persen di 2020.

3.4 Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperlihatkan perkembangan yang positif selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, IPM Sulawesi Tenggara meningkat 2,14 poin dari 69,31 pada tahun 2016 menjadi 71,45 pada tahun 2020, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,77 persen per tahun. Sementara perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi juga menunjukkan tren yang positif selama lima tahun terakhir. Dari Gambar 3.6, IPM Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 mencapai 69,48 poin dan menempati peringkat keenam untuk IPM tertinggi dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Tetapi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sulawesi Tenggara, IPM Kabupaten Wakatobi masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 71,45 poin.

https://wakabupkotabps.go.id

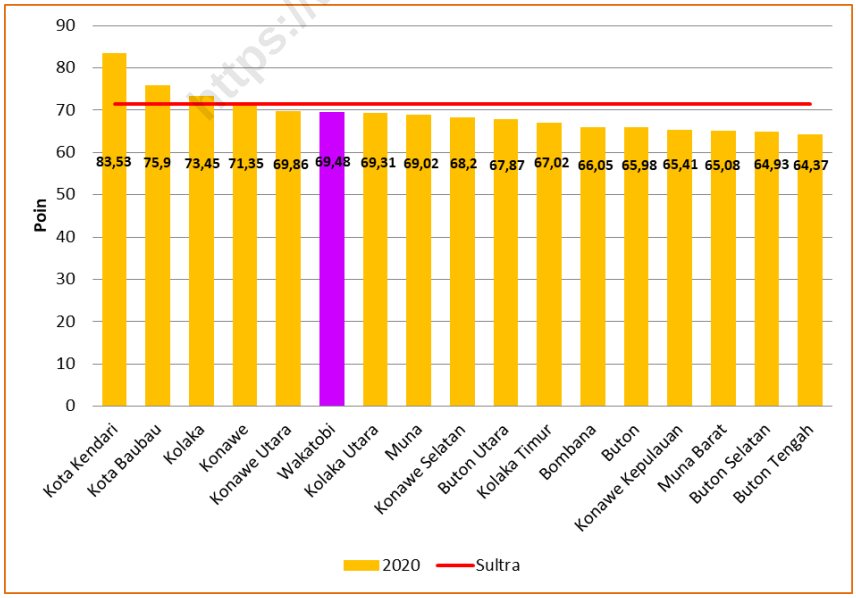

Gambar 3.6: IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2020
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada tahun 2020, IPM tertinggi di Sulawesi Tenggara dicapai oleh Kota Kendari yang telah mencapai status wilayah dengan capaian pembangunan manusia sangat tinggi karena memiliki IPM senilai 83,53 poin. Sementara Kabupaten Buton Tengah menjadi kabupaten dengan capaian pembangunan manusia terendah di Sulawesi Tenggara dengan IPM senilai 64,37 poin (status wilayah dengan capaian pembangunan manusia sedang). Kabupaten Buton Tengah tergolong kabupaten yang masih muda karena baru berdiri pada tahun 2014 bersama Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat.

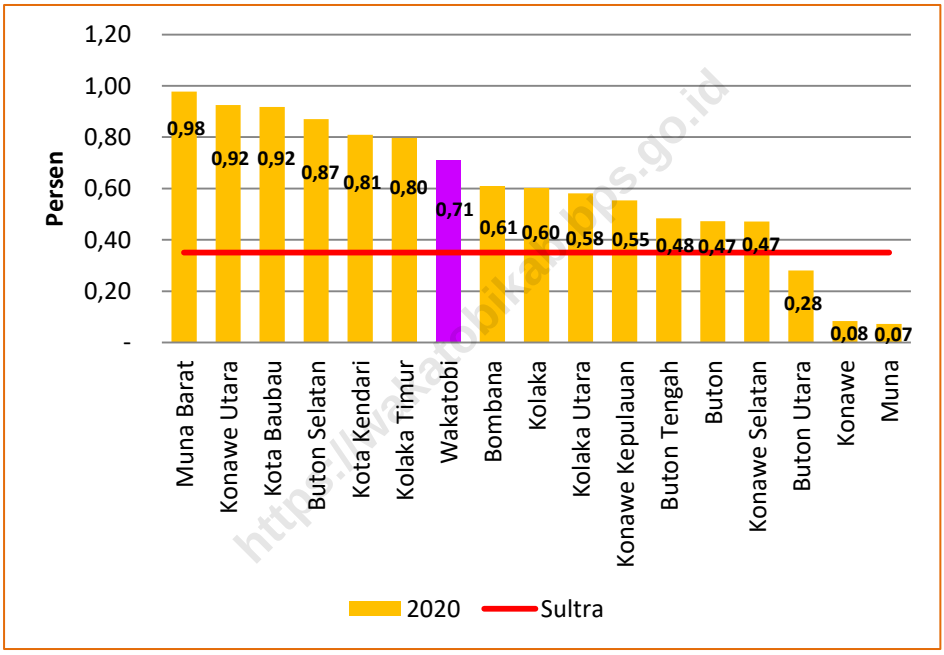

Gambar 3.7: Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, 2020
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Laju pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara melihat perbandingan perkembangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya selama dua tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami perlambatan capaian pembangunan manusia di tahun 2020, kecuali Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna Barat, Kota Kendari, dan Kota Bau-bau. justru sebaliknya. Untuk laju pertumbuhan IPM pada level kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mempunyai laju pertumbuhan IPM tertinggi di tahun 2020 adalah Kabupaten Muna Barat dengan

pertumbuhan sebesar 0,98 persen (Lihat Gambar 3.7). Sedangkan kabupaten/kota dengan pertumbuhan yang paling rendah adalah Kabupaten Muna dengan laju pertumbuhan sebesar 0,07 persen. Adapun laju pertumbuhan IPM Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 mencapai 0,71 persen dan menempati peringkat ketujuh untuk pertumbuhan IPM di Provinsi Sulawesi Tenggara.

https://wakatobikab.bps.go.id

BAB 4

PENUTUP

https://wilayatobikab.bps.go.id

"... Halaman Sengaja Dikosongkan ..."

https://wakatobikab.bps.go.id

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wakatobi dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Indikator-indikator penyusun IPM menunjukan perkembangan yang semakin membaik. Kondisi demikian menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Indikator-indikator tersebut meliputi:

a. IPM Kabupaten Wakatobi tahun 2020 sebesar 69,48 poin termasuk dalam tingkat capaian pembangunan manusia **sedang** dan berada pada peringkat keenam untuk IPM tertinggi di Sulawesi Tenggara;
b. Selama tahun 2016-2020, pertumbuhan IPM yang selalu positif menunjukkan perkembangan kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Wakatobi;
c. Derajat kesehatan yang dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. AHH Kabupaten Wakatobi tahun 2020 sebesar 70,41 tahun;
d. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolan (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2020 masing-masing sebesar 13,50 tahun dan 7,94 tahun dan dalam 5 tahun terakhir, angka tersebut terus mengalami peningkatan;
e. Kemampuan daya beli masyarakat Wakatobi di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 9,2 juta rupiah.

https://wakatobikab.bps.go.id

PENUTUP

https://wakatobikab.bps.go.id

LAMPIRAN

https://lwakatobikab.bps.go.id

"... Halaman Sengaja Dikosongkan ..."

https://wakatobikab.bps.go.id

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Buton	63,69	64,47	65,08	65,67	65,98
Muna	66,96	67,61	68,47	68,97	69,02
Konawe	69,84	70,24	70,72	71,29	71,35
Kolaka	71,12	71,46	72,07	73,01	73,45
Konawe Selatan	66,97	67,23	67,51	67,88	68,2
Bombana	64,02	64,49	65,04	65,65	66,05
Wakatobi	67,5	67,99	68,52	68,99	69,48
Kolaka Utara	67,6	67,77	68,44	68,91	69,31
Buton Utara	65,95	66,4	67,13	67,68	67,87
Konawe Utara	67,2	67,71	68,5	69,22	69,86
Kolaka Timur	63,6	64,55	65,53	66,49	67,02
Konawe Kepulauan	62,56	63,44	64,36	65,05	65,41
Muna Barat	65,57	63,43	64,11	64,45	65,08
Buton Tengah	62,56	62,82	63,46	64,06	64,37
Buton Selatan	62,55	63,2	63,47	64,37	64,93
Kota Kendari	81,66	81,83	82,22	82,86	83,53
Kota Baubau	73,99	74,14	74,67	75,21	75,9
Sulawesi Tenggara	**69,31**	**69,86**	**70,61**	**71,2**	**71,45**

http://wakatobikab.bps.go.id

Lampiran 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020

Wilayah	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Buton	1,45	1,22	0,95	0,91	0,47
Muna	1,47	0,97	1,27	0,73	0,07
Konawe	0,40	0,57	0,68	0,81	0,08
Kolaka	0,92	0,48	0,85	1,30	0,60
Konawe Selatan	0,98	0,39	0,42	0,55	0,47
Bombana	0,58	0,73	0,85	0,94	0,61
Wakatobi	0,42	0,73	0,78	0,69	0,71
Kolaka Utara	1,05	0,25	0,99	0,69	0,58
Buton Utara	1,10	0,68	1,10	0,82	0,28
Konawe Utara	1,14	0,76	1,17	1,05	0,92
Kolaka Timur	1,37	1,49	1,52	1,46	0,80
Konawe Kepulauan	1,36	1,41	1,45	1,07	0,55
Muna Barat	5,27	- 3,26	1,07	0,53	0,98
Buton Tengah	0,69	0,42	1,02	0,95	0,48
Buton Selatan	0,89	1,04	0,43	1,42	0,87
Kota Kendari	0,28	0,21	0,48	0,78	0,81
Kota Baubau	0,54	0,20	0,71	0,72	0,92
Sulawesi Tenggara	**0,81**	**0,79**	**1,07**	**0,84**	**0,35**

https://wakatobikab.bps.go.id

Lampiran 3. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020

Wilayah	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Buton	67,23	67,3	70,72	67,92	68,25
Muna	69,77	69,77	67,6	70,18	70,39
Konawe	69,48	69,52	69,97	70,02	70,27
Kolaka	69,97	70,05	69,76	70,72	71,06
Konawe Selatan	69,93	69,98	70,38	70,52	70,8
Bombana	67,72	67,82	70,24	68,54	68,91
Wakatobi	69,54	69,59	68,17	70,13	70,41
Kolaka Utara	69,62	69,74	69,85	70,15	70,36
Buton Utara	70,37	70,38	69,94	70,75	70,93
Konawe Utara	68,64	68,69	70,56	69,23	69,51
Kolaka Timur	71,58	71,66	68,95	72,33	72,67
Konawe Kepulauan	67,87	67,88	71,99	68,25	68,43
Muna Barat	69,78	69,79	68,06	70,16	70,34
Buton Tengah	67,17	67,17	69,97	67,5	67,66
Buton Selatan	67,17	67,17	67,33	67,5	67,66
Kota Kendari	72,98	73,02	67,33	73,52	73,77
Kota Baubau	70,47	70,5	73,26	70,95	71,19
Sulawesi Tenggara	**70,46**	**70,47**	**70,72**	**70,97**	**71,22**

https://wakatobikab.bps.go.id

Lampiran 4. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Buton	13,22	13,52	13,53	13,74	13,75
Muna	13,2	13,48	13,77	13,78	13,79
Konawe	12,96	12,97	12,98	12,99	13
Kolaka	12,37	12,38	12,39	12,8	12,81
Konawe Selatan	12,16	12,22	12,23	12,24	12,36
Bombana	11,8	11,81	11,82	11,83	11,84
Wakatobi	12,87	13,14	13,15	13,2	13,5
Kolaka Utara	11,92	11,93	12,09	12,1	12,11
Buton Utara	12,72	12,73	12,74	12,75	12,76
Konawe Utara	11,93	12,02	12,33	12,54	12,83
Kolaka Timur	11,33	11,58	11,89	12,15	12,41
Konawe Kepulauan	10,94	11,3	11,59	11,81	12,06
Muna Barat	11,64	12,06	12,13	12,2	12,5
Buton Tengah	12,31	12,32	12,35	12,7	13
Buton Selatan	12,54	12,55	12,56	12,94	13,23
Kota Kendari	16,05	16,06	16,2	16,28	16,62
Kota Baubau	14,78	14,79	14,8	14,81	15,16
Sulawesi Tenggara	**13,24**	**13,36**	**13,53**	**13,55**	**13,65**

https://wakatobikab.bps.go.id

Lampiran 5. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Buton	7,06	7,22	7,5	7,51	7,71
Muna	7,66	7,89	8,19	8,35	8,36
Konawe	8,6	8,77	8,94	9,14	9,15
Kolaka	8,19	8,31	8,57	8,76	8,98
Konawe Selatan	7,71	7,72	7,73	7,74	7,86
Bombana	7,52	7,53	7,54	7,74	8,03
Wakatobi	7,7	7,71	7,72	7,73	7,94
Kolaka Utara	7,49	7,5	7,67	7,86	8,12
Buton Utara	7,92	8,18	8,54	8,75	8,92
Konawe Utara	8,41	8,62	8,81	8,97	9,21
Kolaka Timur	6,65	6,9	7,18	7,35	7,56
Konawe Kepulauan	8,8	8,9	9,17	9,18	9,41
Muna Barat	6,24	6,48	6,76	6,77	7,01
Buton Tengah	7,01	7,02	7,28	7,29	7,3
Buton Selatan	6,81	7,06	7,07	7,32	7,53
Kota Kendari	11,67	11,68	11,69	11,94	12,2
Kota Baubau	9,89	9,9	10,13	10,37	10,64
Sulawesi Tenggara	**8,32**	**8,46**	**8,69**	**8,91**	**9,04**

https://wakatobikab.bps.go.id

Lampiran 6. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2016-2020

Wilayah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Buton	6.950	7.117	7.209	7.366	7.307
Muna	7.928	8.000	8.098	8.253	8.203
Konawe	9.696	9.857	10.004	102	10.126
Kolaka	12.072	12.243	12.384	12.525	12.515
Konawe Selatan	8.660	8.798	8.914	9.115	9.037
Bombana	7.607	7.908	819	8.344	8.234
Wakatobi	8.651	8.800	9.136	9.388	9.204
Kolaka Utara	9.846	9.941	10.133	10.258	10.218
Buton Utara	7.168	7.249	7.393	7.534	747
Konawe Utara	8.822	8.943	905	9.215	9.165
Kolaka Timur	7.283	7.499	7.606	7.832	7.727
Konawe Kepulauan	6.227	6.458	6.601	6.832	67
Muna Barat	7.221	7.288	7.405	7.526	7.485
Buton Tengah	6.860	7.012	716	7.264	7.221
Buton Selatan	6.859	7.075	7.192	7.293	7.263
Kota Kendari	13.828	13.995	14.168	14.392	14.335
Kota Baubau	10.110	10.223	10.374	10.523	10.483
Sulawesi Tenggara	**8.871**	**9.094**	**9.262**	**9.436**	**9.331**

https://wakatobikab.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://wakatobikab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI
Jl. Utudae Samad No. 25, Wakatobi, 93795
Telp/Faks : (0404) 2222003
Homepage : https://wakatobikab.bps.go.id
E-mail : bps7407@bps.go.id